

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. (Harnida, 2012)

Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan. (Harnida, 2012)

Sarana dan prasarana dalam suatu objek wisata itu juga sangat diperlukan untuk menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang disediakan di suatu objek wisata akan membuat wisatawan nyaman dan betah menikmati objek wisata tersebut. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

Wilayah Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki iklim yang memunculkan beraneka ragam flora dan fauna yang mempesona para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yang berupa hutan hujan tropis, gunung, pantai, dan juga lautan serta keanekaragaman budaya yang merupakan modal dasar yang sangat potensial untuk di jadikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang terkenal di dunia. Dilatar belakangi oleh keindahan alam dan keanekaragaman budaya, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang terkenal akan objek wisata, baik itu objek wisata alam maupun objek wisata budaya.

Negara Indonesia juga termasuk negara maritim dan banyak keindahan - keindahan alam di dalamnya seperti salah satunya pantai yang ada di setiap penjuru di Indonesia, selain itu pantai juga dipergunakan untuk wahana berwisata dan menjadi salah satu pendukung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga dapat menjaga kelangsungan hidup para pelaku wisata khususnya masyarakat sekitar.

Selain untuk menjaga kelangsungan hidup para pelaku wisata, pendapatan dari objek-objek wisata juga dapat meningkatkan pemasukan bagi pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya. Untuk kelancaran pengembangan pariwisata diperlukan beberapa pendorong yang penting antara lain seperti jalan yang baik, transportasi darat, laut, udara,

dan akomodasi sebagai sarana yang tak kalah pentingnya dalam pengembangan pariwisata.

Pengembangan objek dan daya tarik wisata merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, lalu kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun pihak swasta. Daya tarik wisata dan pengembangan objek tersebut yang merupakan salah satu modal yang harus dimiliki untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wisata dan daya tarik yang membuat pengunjung dan wisatawan tertarik akan mengunjungi daerah tersebut. (dalam Helln, 2017)

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sumber devisa negara yang mempunyai potensial dan andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Sektor pariwisata di Indonesia hal yang sangat mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastuktur, keamanan dan management yang baik agar mampu menciptakan sektor pariwisata yang diminati wisatawan lokal maupun asing dengan rasa kepuasan yang baik. Dalam hal ini maka akan menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan Negara. (Rotua, 2016)

Menurut definisi pariwisata yang dikatakan oleh Spillane (dalam Nurfadillah, 2017) menyebutkan bahwa pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorang maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keselarasan dan

kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang eksotis menjadi tempat pariwisata. Kita tahu bahwa sektor pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional, sebagai tambahan sumber penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor ini telah menjadi tumpuan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Setyo, 2018)

Destinasi wisata khususnya di Kabupaten Bantul yang merupakan sektor pariwisata daerah yang semakin berkembang pada era saat ini. Sejumlah wisata di pantai selatan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi, termasuk beberapa objek wisata alam di wilayah perbukitan yang diminati wisatawan. Salah satu objek wisata yang sering ramai dikunjungi para wisatawan yaitu pantai parangtritis, namun fasilitas pendukung yang masih terbatas sehingga perlu adanya upaya untuk lebih dikembangkan karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah. (Adhika, 2013)

Pantai Parangtritis adalah adalah sebuah pantai di pesisir Samudra Hindia yang terletak kira - kira 27 kilometer sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata pantai yang cukup terkenal di Yogyakarta

selain objek pantai lainnya seperti Samas, Depok, Cemara Sewu, Pelangi, dll. Sebenarnya di wilayah pesisir selatan terdapat sekitar 10 obyek wisata Pantai yang semuanya memiliki pesona wisata. Namun entah mengapa Pantai Parangtritis yang menempati urutan pertama dalam angka kunjungan wisata, dibanding pantai-pantai lainnya dikarenakan Pantai Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya yaitu selain adanya bukit – bukit yang indah seperti bukit watugupit juga terdapat objek wisata Gumuk Pasir di sekitar Pantai Parangtritis. (dalam Saputro, 2012)

Selain itu dapat dilihat juga dari tabel di bawah ini yang menjelaskan data kunjungan wisatawan Pantai Parangtritis dari tahun 2015-2017. Adanya peningkatan wisatawan setiap tahunnya ini juga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar Pantai Parangtritis.

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Pantai Parangtritis

Data Kunjungan Wisatawan	Tahun	Jumlah Wisatawan
Pantai Parangtritis	2015	1.999.870
	2016	2.229.125
	2017	2.771.766

Sumber : Data Kepariwisataaan DIY 2017.

Dari data pengunjung wisatawan Pantai Parangtritis tahun 2015 jumlah pengunjung 1.999.870 lalu pada tahun 2016 jumlah pengunjung bertambah menjadi 2.229.125 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 2.771.766 pengunjung bisa dikatakan setiap tahun jumlah pengunjung di Pantai Parangtritis

meningkat dan dapat dikatakan dari hasil data pengunjung tersebut upaya pemerintah dalam peningkatan wisatawan Pantai Parangtritis dikatakan berhasil, tetapi masih banyak fasilitas yang harus diperbaiki.

Salah satu yang akan dikembangkan di Pantai Parangtritis ini pemerintah akan melakukan revitalisasi ikon dan *spot* wisata di Pantai Parangtritis yang bertujuan untuk mempercantik penampilan sarana pendukung destinasi wisata di Pantai Parangtritis. Agar tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan maka akan dilakukan penataan kembali dan juga akan dibuat sebuah taman di seputaran Pantai Parangtritis untuk tempat berfoto bagi para wisatawan. Lalu selain itu juga akan membangun ikon wisata baru untuk tempat sewa foto di sejumlah objek wisata setempat. (Atmoko, 2009)

Lalu hal yang menarik yang dapat saja ambil dari penelitian saya Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai yang mempunyai keindahan alam yang banyak dikagumi oleh wisatawan, sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi Pantai Parangtritis, selain itu Pantai Parangtris cukup menarik juga terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara, adapun hal yang menarik dari Pantai Parangtritis terdapat Gumuk Pasir yang mempesona membuat para wisatawan lebih tertarik akan adanya Gumuk Pasir tersebut karena Gumuk Pasir ini hanya ada di area Pantai Parangtritis saja, banyak spot berfoto dan bunga – bunga yang dapat menambah keindahan Pantai Parangtritis.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam Pembangunan Pariwisata di Pantai Parangtritis Tahun 2015-2017 ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui terkait peran pemerintah di dalam pembangunan pariwisata di pantai parangtritis
2. Mengetahui pembangunan pariwisata di pantai parangtritis dari tahun ke tahun apakah memiliki kemajuan atau tidak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan memperbanyak wawasan, karena peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata pada masa sekarang sedang menjadi sorotan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai bagaimana peran pemerintah dalam menangani pembangunan pariwisata di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul tersebut dan bagi peneliti selanjutnya tertarik untuk meneliti.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan pemerintah dapat memboyong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam jalannya pembangunan pariwisata tersebut yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan informasi dan keterangan terkait Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata yang terjadi sebaiknya melakukan literature terlebih dahulu agar bisa ditelaah bahwa penelitian yang akan diteliti itu sudah layak untuk diteliti.

Tabel 1.3 Kajian Pustaka

No	Judul	Penulis	Isi	Jurnal
1.	Membangun Pariwisata Bersama Rakyat : Kajian Partisipasi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau.	Destha Titi Raharjana	Partisipasi masyarakat hakikatnya bukan semata mendorong terjadinya proses penguatan kapasitas masyarakat lokal, tetapi merupakan sebuah mekanisme guna meningkatkan pemberdayaan bagi warga untuk terlibat dalam pembangunan secara bersama. Dalam konteks pembangunan pariwisata tampaknya partisipasi masyarakat penting untuk terus didorong guna mendistribusi keuntungankeuntungan dari kegiatan kepariwisataan.	Jurnal Kawistara Vol 2. Tahun 2012
2.	Strategi Optimisasi Wisata Masal Di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Grojogan Sewu.	Hariadi Siswantoro , dkk	kecenderungan ekowisata secara internasional memang mengalami peningkatan, namun secara ekonomi, wisata massal dengan jumlah wisatawan berskala besar dan terus menerus dipandang lebih menguntungkan daripada	Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 10. Tahun 2012

			ekowisata dengan jumlah wisatawan berskala kecil dan tidak menentu.	
3.	Peran Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Atraksi Wisata Di Desa Wisata Tembi Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Theofilus Retmana Putra	Salah satu desa wisata yang mencerminkan kentalnya unsur kebudayaan dan tradisi Jawa Klasik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Desa Wisata Tembi yang ada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Desa wisata ini mengalami perkembangan cukup signifikan yang terlihat dari jumlah atraksi wisata yang ditawarkan semakin beragam, sehingga mampu mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung.	Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 9. Tahun 2013
4.	<i>Community Based Tourism</i> Tantangan Dusun Nglepen Dalam Pengembangan Desa Wisata.	Dhimas Setyo Nugroho	Pengembangan Desa Wisata. Masyarakat perdesaan yang mayoritas mata pencaharian sebagai petani dan memelihara ternak. Saat ini tinggal di rumah dome tidak bisa memelihara hewan ternak, tentu terdapat perubahan pola kehidupan sosio-kultural yang sangat terasa bagi masyarakat. Dalam konsep pariwisata, dimana ada keunikan disitu akan semakin menarik hingga memuaskan wisatawan dalam berwisata.	Jurnal Pariwisata Vol 10. Tahun 2018
5.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya	Yosef Abdul Ghani	Inovasi sarana prasarana merupakan cara terpenting bagi suatu organisasi guna menciptakan nilai bagi pengunjung dan mencapai keunggulan yang kompetitif,	Jurnal Pariwisata. Tahun 2017

	Di Jawa Barat		inovasi produk tersebut akan berdampak secara langsung terhadap keberhasilan suatu organisasi yang ditunjukkan dengan peningkatan <i>revenue</i> maupun profitnya. Maka dari itu pengembangan sarana prasarana pariwisata mengedepankan unsur budaya merupakan suatu hal yang baru dan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan,	
6.	Peranan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata <i>Heritage</i> Di Trowulan.	Christy Widyawati	Wisata <i>Heritage</i> tentu saja tidak bisa lepas dari kontribusi masyarakat atau komunitas lokal. Kegiatan wisata <i>Heritage</i> berhubungan langsung dengan aspek pengorganisasian masyarakat lokal, sosial budaya, dan ekonomi . Pembentukan opini dan sikap masyarakat seperti menghormati budaya lokal, melestarikan umber daya alam, dan mendidik wisatawan maupun penduduk lokal terhadap perlindungan warisan budaya dan pariwisata	Jurnal Pariwisata Vol 5. Tahun 2018
7.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata hutan batu Ramang – Ramang di Kabupaten Maros.	Harnida	Pemerintah daerah kabupaten Maros kurang memperhatikan obyek wisata tersebut salah satu buktinya kebanyakan masyarakat hanya mengetahui obyek wisata Bantimrung fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai padahal obyek wisata tersebut sangat indah untuk dikunjungi.	Jurnal Ilmu Pemerintahan . Tahun 2012
8.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan	Rotua Kristin Simamora	Berbagai potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, sudah	Jurnal Pariwisata. Tahun 2016

	Pariwisata Alam Dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara.		sepantasnya daerah ini menjadi destinasi wisata yang baru dan unggul di Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan obyek wisata masih mengandalkan insentif dari pemerintah daerah, yang dalam perkembangannya dengan perijinan dari pemerintah daerah dapat dikelola oleh pihak swasta serta masyarakat.	
9.	Peran <i>Strategi City Branding</i> Kota Batu Dalam Trend Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu.	Stephen Intyaswono	Fenomena <i>City Branding</i> atau <i>Destination Branding</i> sekarang ini menjadi trend pada semua negara yang maju maupun berkembang. Sektor pariwisata merupakan sektor yang strategis karena dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penerimaan keuangan negara.	Jurnal Administrasi Bisnis Vol 30. Tahun 2016
10	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Pada Taman Tirta Wisata	Retno Puji Rahayu	Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah strategi pengembangan pasar dan promosi yang dilakukan dengan promosi melalui media cetak dan elektronik serta even seni budaya. Dalam pengembangan pasar dan promosi masih kurang optimal karena masih kurangnya	Jurnal Administrasi Publik Vol 3. Tahun 2015

	Keplaksari Kabupaten Jombang)		promosi melalui media cetak dan elektronik seperti halnya pada penyebaran brosur, banner serta promosi melalui radio agar Taman tersebut tidak menjadi pudar karena sudah banyak tempat wisata lainnya maka memudar.	
11.	Pengembangan Agrowisata dengan Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Batu dan Kusuma Agrowisata Batu)	Vianda Kushardianti Muzha	Pariwisata masih menempatkan masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek atau pelaku penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini menyebabkan masyarakat lokaln belum menerima nilai manfaat pengembangan pariwisata secara optimal dan memadai. Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai modernisasi dengan prasarana pendukung yang lebih lengkap.	Jurnal Administrasi Publik. Tahun 2004
12.	Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan)	Fajriah, dkk	Salah satu bentuk pendekatan dalam pengembangan pariwisata adalah pendekatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, sehingga upaya dalam pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara optimal. Aspek sarana dan prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan yaitu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan wisata dan sebagai pengendali dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan.	Jurnal Pariwisata. Tahun 2014

Sumber : Data diolah oleh peneliti

F. Kerangka Dasar Teori

1. Peran

Menurut Soekanto (2009), arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

Peran merupakan sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. (Menurut Riyadi, 2002)

Sedangkan menurut Menurut Edy (2003), peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini di dapat dilihat pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorangn tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh, ia diharuskan berperilaku secara tertentu.

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.

Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. (Muhadam, 2016)

Menurut Ridwan (2008) istilah pemerintah dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*government*". Dalam bahasa Perancis dikenal istilah "*gouvernement*" yang kedua-duanya berasal dari perkataan latin "*gubernaculum*", artinya "kemudi", disalin dalam Bahasa Indonesia kadang-kadang dengan pemerintah, atau pemerintahan dan kadang-kadang juga dengan penguasa. Menurut Tjandra istilah pemerintah dalam negara hukum

modern sering dipadankan dengan istilah dalam bahasa Belanda “*bestuur*” yang oleh Hadjon dinyatakan bahwa “*bestuur*” dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Menurut Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Antara Instansi Pemerintah”, gagasan pemerintah menjelaskan bahwa, istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah. (Pranadjaja, 2003)

Sedangkan pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Ridwan, 2009)

Selain itu pemerintah sendiri juga mengeluarkan kebijakan seperti halnya, Leo (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi

kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Adapun di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi untuk mensejahterakan rakyatnya. Berkaitan dengan peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang tengah dilakukan dalam bentuk cara bertindak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang telah dibuat.

Solichin mengemukakan bahwa pemerintah di dalam istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan.
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi (2007), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita 13 mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*)

program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design. (Suharno, 2009)

Lalu selain itu juga dari kebijakan pemerintah tersebut, pemerintah mempunyai strategi-strategi salah satunya dapat dikatakan dari teori Menurut Quinn seperti yang dikutip oleh Sukristono dalam bukunya mengemukakan bahwa strategi meliputi sasaran-sasaran terpenting yang akan dicapai, kebijakan-kebijakan yang penting yang mengarahkan pelaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. Mewujudkan beberapa konsep dan dorongan yang memberikan hubungan, keseimbangan dan fokus. Strategi mengutarakan sesuatu yang tidak dapat diduga semula atau sesuatu yang tidak dapat diketahui.

Menurut David (2011) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi georafis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.

Sedangkan Menurut Peace (2008), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan dapat di simpulkan bahwa pengertian dari

strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan masyarakat.

Menurut Suryono (2004) Strategi pada prinsipnya adalah suatu persoalan yang berkaitan dengan tujuan, kebijakan, pelaksanaan, penentuan cara-cara atau metode yang akan dicapai dengan metode penggunaan sarana dan prasarana.

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian di atas merupakan upaya bagi pemerintah untuk melaksanakan suatu perencanaan itu harus mencakup suatu kebijakan juga dan menetapkan strategi yang akan dicapai.

3. Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi, 2005).

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli.

Menurut Siagian (2004) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan juga pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nationbuilding*).

Menurut Rochmin (2004). Upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Lalu menurut Tikson (2005) mengatakan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Pembangunan (*Development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994), lalu menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995). Dengan demikian, proses

pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli di atas bahwa, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana sebagaimana mestinya. (Riyadi, 2005)

4. Pariwisata

Pariwisata secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “pari” dan wisata. Pari yang berarti ber ulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar. Sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan secara berulang. Saputro (2016), mengemukakan bahwa pariwisata merupakan perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan/rutinitas sehari-hari.

Pariwisata adalah salah satu hak yang sangat penting bagi negara. Dengan adanya pariwisata di suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu memberikan pendapatan secara khusus atau pemasukan bagi pendapatan daerah (Fandi, 2012). Oleh karena itu sektor pariwisata Indonesia menjadi perhatian secara khusus dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan pariwisatanya.

Selain itu, pariwisata merupakan sektor yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi besar bagi suatu wilayah atau negara. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat memberikan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang pengertian pariwisata, berikut ini merupakan beberapa pendapat para ahli tentang definisi pariwisata.

Richardson (2004) Pariwisata merupakan kegiatan-kegiatan atau orang-orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di luar lingkungan mereka selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk bersantai, bisnis dan tujuan lainnya.

Pengertian pariwisata menurut Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Menurut Pitana dan Gayatri (2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Youti, (2010). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata

dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “reavel” dalam bahasa Inggris. Maka dari itu kata “Pariwisata” dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ketempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*Tour*”

Selain itu pengertian dari kepariwistaan masih ada tujuan serta manfaatnya sesuai dengan intruksi presiden Nomor 9 Tahun 1969 yang dikutip dari buku “Perencanaan Pengembangan Pariwisata” oleh Youti (2010) . Dikatakan bahwa tujuan dari pengembangan kepariwistaan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara serta masyarakat pada umumnya.
- 2) Memperluas kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
- 3) Memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- 4) Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional.

5. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terencana dan terpadu yang memegang prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian nilai agama, budaya dan lingkungan alam, dan yang paling penting harus tetap menjaga Negara Keasatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009, Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Muljadi (2009) Berpendapat bahwa pembangunan pariwisata adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala. Upaya-upaya dalam pembangunan pariwisata diantaranya :

- (a) Pengembangan objek dan daya tarik pariwisata.
- (b) Pengembangan sarana dan prasarana.
- (c) Pemasaran dan Promosi Pariwisata.
- (d) Pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Cooper (dalam Khusnul, 2017) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut :

- a. Objek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan.
- b. Akseibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan transportasi

- c. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
- d. Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

G. Definisi Konseptual

1. Dinas Pariwisata

Peran Pemerintah Dinas Pariwisata ini merupakan sekumpulan orang yang memiliki kewenangan, tanggungjawab, memiliki kebijakan dan juga strategi untuk memajukan masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya. Selain itu juga pemerintah adalah sebagai wadah bagi masyarakat atau aparat yang mengurus segala urusan pemerintahan.

2. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan Pariwisata adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik wisata untuk memboyong wisatawan agar dikenal oleh seluruh penjuru dunia dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, serta menjunjung tinggi kemajemukan tradisi seni dan budaya.

G. Definisi Operasional

1. Peran Dinas Pariwisata

2. Program

- a. Menggunakan Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Menggunakan Pemasaran Pariwisata

c. Menggunakan Pengembangan Kemitraan

d. Menggunakan Pelayanan Administrasi Perkantoran

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian yang saya kaji saya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya dalam membangun pandangan mereka yang diteliti, rinci dengan dibentuk menggunakan kata-kata, gambaran holistik. (Moleong, 2014)

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut (Sugiyono, 2010) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

2. Unit analisa data

Unit analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja yang menggunakan data, pengorganisasian data, memilah-milahnya dapat menjadi satuan untuk dikelola, mencari dan menemukan pola yang akan diceritakan di dalam penelitian tersebut. (Moleong, 2014)

Unit analisa atau objek analisa yang dibahas adalah mengenai peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata yang ada di pantai parangtritis lalu juga akan dibahas peran pemerintah dalam penanganan pembangunan pariwisata di pantai parangtritis dari mulai tahun 2015 sampai tahun 2017.

3. Jenis Sumber data

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden ini digunakan didalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah dari pihak pemerintah dan masyarakat mengenai pembangunan pariwisata. (Moleong, 2014)
 - A. Kwintarto selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
 - B. Karman selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
 - C. Suranto selaku Pengelola Pantai Parangtritis
 - D. Triwaldianto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
 - E. Handri selaku Kepala Dukuh Pantai Parangtritis
2. Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket yang merupakan sumber data sekunder. (Sugiyono, 2010)

J. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan instrument pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Jenis wawancara yang saya terapkan di dalam penelitian saya menggunakan wawancara yang sifatnya terbuka. Wawancara terbuka ini adalah wawancara yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut. (Moleong, 2014)

2. Observasi

Menurut Arikunto (2006) Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasari, 2010) kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang.

Untuk melengkapi data yang diperoleh penulis melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mencari informasi yang lebih akurat. Yang dapat penulis lihat di lapangan pada 20 Maret 2019 penulis dapat melihat kenyataan keadaan di lapangan bahwa masih banyak sekali yang harus diperbaiki seperti halnya dari sarana dan

prasarana di Pantai Parangtritis salah satunya yaitu lahan parkir yang masih belum tertata, maka perlunya penataan lahan parkir, lalu yang belum ada disana seperti ATM, rest area, dan lain sebagainya pemerintah selaku pihak yang berwenang harus lebih memperhatikan fasilitas yang belum ada di Pantai Parangtritis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan dokumen-dokumen yang bisa memberikan keterangan atau bukti yang berhubungan dengan suatu proses pengumpulan dan pengolahan dokumen dengan sistematis dan juga menyebarluaskan untuk pengguna dokumen tersebut.

Hamidi (2004) menjelaskan istilah dokumen dibedakan dengan record. Definisi *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang / lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan Robert C. Bogdan seperti dikutip Sugiyono (2005) menyebutkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar seseorang.

K. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini Teknik Analisis Data ada 3 cara yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*), merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir tersusun. Jadi, dalam penelitian kualitatif, reduksi data tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (Data Display), merupakan alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*conclusion Drawing / verification*), merupakan kegiatan analisis data yang ketiga dalam penelitian kualitatif yaitu, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2010)